

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Klaim China atas wilayah di Laut Natuna Utara dengan *nine dash line* perlu disikapi dengan tepat dan strategis oleh pemerintah Indonesia khususnya kementerian Pertahanan, hal itu perlu dilakukan karena Indonesia memiliki kepentingan atas wilayah tersebut untuk menjaga kedaulatan terkait dengan geopolitik dan geostrategi di wilayah Laut China Selatan yang di wilayah ZEE Indonesia menyebutnya sebagai laut Natuna Utara. Indonesia memiliki klaim terhadap Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE, wilayah yang juga di klaim China dalam *nine dash line* yang tidak diakui oleh Indonesia, sementara China tidak mengakui ZEE Indonesia. Perubahan kekuatan China sejak perang dunia 2 belakangan sampai tahun 2000-an membuat China percaya diri melakukan manuver untuk mengklaim wilayah yang China sebut sebagai wilayah tradisional sejarah sejak zaman dinasti Ming. Inilah yang mendasari konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China ketika China melakukan klaim sepihak dan tidak berdasar atas kepemilikan Laut China Selatan atau yang sekarang telah berganti nama menjadi Laut Natuna Utara.

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak

berdaya, Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus¹.

Konflik bilateral ini terjadi karena China mengklaim Laut Natuna Utara melalui teori *Nine Dash Line* yang artinya adalah sembilan titik imajiner yang menjadi dasar bagi China, dengan dasar historis, untuk mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Karena pemerintah China menganggap bahwa wilayah tersebut adalah milik China karena sesuai dengan bukti historis yang dimana wilayah tersebut telah menjadi wilayah para nelayan Republik Rakyat China menangkap ikan sehingga Pemerintah China merasa bahwa wilayah tersebut adalah miliknya, sedangkan pemerintah Indonesia memiliki hak wilayah tersebut secara *De Jure* (berdasarkan hukum) yang terikat dalam perjanjian Konvensi Hukum Laut (KHL) pada tahun 1982. Lebar laut teritorial maksimal sejauh 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Selain itu, dalam Konvensi Hukum Laut ketiga juga menambahkan sebuah rezim hukum baru yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sehingga rezim hukum laut dalam KHL 1982 ialah: Laut Teritorial, Zona Tambahan, ZEE, dan Laut Lepas. Di Laut Teritorial negara pantai memiliki kedaulatan penuh, sedangkan pada rezim hukum laut lainnya hanya berlaku hak berdaulat bagi negara pantai.²

Atas konflik tersebut Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pertahanan melakukan beberapa strategi politik atas respon terhadap konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara. Menteri pertahanan saat ini Prabowo Subianto

¹ Mohamad Muspawi, *Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi)*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, Jambi, 2014, hlm. 46.

² Yohana, Ria, dkk, *Perbandingan Proses Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Di Laut Teritorial dan Di Zee Natuna Indonesia*, Diponegoro Law Review, (Semarang), 2015, hlm. 2.

berkunjung ke Amerika Serikat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan³, Menhan Prabowo Subianto juga mulai melakukan banyak kerjasama pertahanan dengan negara di Eropa seperti Prancis, dikutip dari Reuters, Kementerian militer Prancis mengumumkan bahwa Indonesia akan membeli 42 jet tempur Rafale senilai \$ 8,1 miliar sebagai bagian dari serangkaian kesepakatan yang juga mencakup pengembangan kapal selam dan artileri, menjadikan Jakarta klien senjata Prancis terbesar di dunia.⁴

Selain jet tempur *Dassault Rafale* Kemhan juga berencana untuk membeli dua kapal selam kelas *Scorpene* dari Prancis, dikutip dari *cnnindonesia*, segera setelah itu, Kementerian Luar Negeri AS setuju untuk menjual 36 pesawat tempur F-15 canggih kepada Indonesia. Penjualan itu disetujui, menurut Departemen Luar Negeri, untuk meningkatkan keamanan mitra regional.

"Keamanan mitra regional penting untuk stabilitas politik, dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik,"

Kata badan itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.⁵

Dari pernyataan kemenlu AS yang mengatakan bahwa penjualan tersebut adalah untuk stabilitas politik di kawasan Asia-Pasifik, hal ini telah menjadi sinyal bahwa Kementerian Pertahanan telah menjalankan strategi-strategi politik untuk merespon apa yang terjadi di Laut Natuna Utara, Kemenhan RI banyak melakukan manuver politik dalam merespon apa yang terjadi di Laut Natuna

³ Sulistiyani, Ari, Yuli, dkk, *Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut Natuna Utara Semasa Pemerintahan Joko Widodo*, jurnal.dpr.go.id, Jakarta, 2021, hlm. 91.

⁴ Hummel Tasillo, Widiyanto Stanley, *France seals \$8.1 billion deal with Indonesia to sell 42 Rafale jets*, diakses dari Reuters.com, pada tanggal 12 februari 2022, pukul 00:45.

⁵ CNNIndonesia (dalam Agence France-Press), *Kronologi AS Setuju Jual Jet Tempur F-15 dan Alutsista Rp200 T ke RI*, diakses dari *cnnindonesia.com*, pada tanggal 12 februari 2022, pukul 01:03

Utara, pada tahun 2021 saja Menteri pertahanan menggelar latihan gabungan dengan AS, Tentara Angkatan Darat Indonesia (TNI AD) dan Amerika Serikat atau *US Army* akan melakukan Latihan perang bersama Garuda Shield 2021 di Pusat Latihan Tempur Baturaja, Amborawang, dan Makalisung. Latihan berlangsung pada 4 Agustus hingga 14 Agustus 2021.

Dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Amerika Serikat yang diterima di Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021, latihan bersama melibatkan 1.000 prajurit Angkatan Darat AS dan 850 prajurit TNI AD, bunyi keterangan Kedubes AS.⁶

“Latihan ini terus memperkuat Kemitraan Pertahanan Utama AS-Indonesia serta mendorong kerja sama dalam mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,”

Penelitian mengenai strategi kementerian pertahanan pada masa kepemimpinan Prabowo Subianto masih sangat sedikit yang mengulas terlebih lagi karena masalah ini bisa dibilang baru sehingga masih sangat sulit menemukan penelitian serupa, akan tetapi ada beberapa yang mengulas mengenai sikap pemerintah Indonesia terhadap konflik di Laut Natuna Utara seperti yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alumni Universitas Pertahanan yaitu Sulistyani Yuli Ari, dkk pada tahun 2021 yang berjudul “Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo”⁷ penelitian ini menuliskan bahwa pemerintah Indonesia mempunyai penguakuan secara *de jure* atas sengketa Laut Natuna Utara melalui *a United Nations Convention on the Law of the Sea (UNLOS)* dan ZEE akan tetapi pemerintah

⁶ Antara, *TNI AD dan Tentara AS Gelar Latihan Perang Terbesar dalam Sejarah*, diakses dari Dunia.tempo.co, diakses pada tanggal 12 Februari 2022, pada jam 01:42

⁷ Sulistyani Yuli Ari, dkk., loc.cit.

China semakin jauh mengakui wilayah LCS dengan mengirimkan kapal *Coast Guard* (penjaga pantai) ke wilayah tersebut sehingga belum ditemukan konsensus atas konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Gerald TLT dan Adi Sunaryo⁸. Penelitian yang dilakukan oleh Touran dan Sunaryo Adi menggunakan metode kualitatif dan menggunakan data sekunder dengan studi pustaka. Adapun kesamaan yang terdapat dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada konflik yang terjadi antara Indonesia-China adalah karena adanya pelanggaran UNCLOS 1982 dengan China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Natuna Utara melalui *Nine Dash Lines*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh AS Gunawan dan Isrina Siregar⁹. Peneliti menjelaskan bahwa Banyak sekali faktor yang mengakibatkan China sangat keenam dalam memperjuangkan wilayah LCS yang kaya akan potensi, salah satunya adalah sebagai dampak dari Pembangunan penduduk yang cepat memperhatikan peningkatan pemanfaatan energi minyak. Dan yang terakhir merupakan penelitian dari Reni Setiowati¹⁰ dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa Stabilitas kawasan adalah kunci dari menguatnya Laut Natuna Utara sebagai pusat aktivitas perdagangan karena kawasan LCS mengandung nilai ekonomis, politis, dan strategis sebagai *Sea Lanes of Trade* (SLOT) dan *Sea*



⁸ Touran GTL, Sunaryo Adi, Op.Cit, hlm. 9.

⁹ Gunawan AS, Siregar Isrina, *Peranan Pemerintahan Indonesia dalam Menjaga Keutuhan Wilayah Maritim NKRI dalam Konflik Laut Natuna Utara*, Jurnal Sejarah & Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jambi, Jambi, 2021

¹⁰ R Setiowati, dkk, *Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Konflik di Laut Natuna Utara*, Rekayasa, 2021.

Lanes of Communication (SLOC) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Kekurangan dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu belum ada yang meneliti dari sisi strategi politik yang dilakukan oleh Kemenhan setelah dijabat Prabowo Subianto, apakah ada usaha konsensus dalam konflik yang terjadi, kebanyakan peneliti sebelumnya bertokus terhadap sikap Presiden, dan juga penelitian terdahulu sebelum era Menteri Pertahanan Prabowo Indonesia menerapkan sikap politik yang lembut terhadap konflik Laut Natuna Utara.

Peneliti melakukan penelitian pada Era jabatan Prabowo sebagai Menhan yang dimana masih baru menjabat yaitu dari tahun 2019 hingga sekarang 2022 sehingga hal ini akan memberikan kebaharuan dalam penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini berangkat dari semakin memanasnya situasi di LNU dengan kehadiran Amerika dan Eropa dengan membentuk AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) dan strategi politik Kemenhan yang cukup agresif dengan membeli alutsista kepada Prancis dan Amerika Serikat untuk merespon yang terjadi di Kawasan LNU. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori Pilihan Rasional oleh Coleman yang dimana teori tersebut menekankan bahwa seorang individu melakukan sebuah tindakan yang mana tindakan tersebut akan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya, tindakan seseorang itu merupakan tindakan purposif atau bertujuan.

Konflik yang juga mendapat intervensi dari kepentingan asing seperti Amerika Serikat yang menjadikan kasus di Laut Natuna Utara ini menarik karena

perpolitikan dalam negeri Indonesia menjadi dilemma mengenai kebijakan pemerintah yang dimana Amerika dan China merupakan teman dekat Indonesia, tentu saja Indonesia ingin menjaga hubungan dengan kedua negara tersebut sehingga penyelesaian konflik yang tepat adalah kunci dari hubungan yang baik antara negara-negara besar tersebut.

Kasus yang terjadi di Laut Natuna Utara ini memberikan banyak kontribusi bagi Indonesia selain dari meningkatnya sistem pertahanan Indonesia, karena dalam setiap konflik kedua belah pihak akan selalu menjadi lebih baik dari pihak lainnya sehingga konflik ini mendorong untuk Indonesia mengembangkan sistem pertahanannya, selain itu konflik ini juga menumbuhkan hubungan-hubungan dengan negara lain yang mempunyai kepentingan yang sama atas yang terjadi di LCS.

